

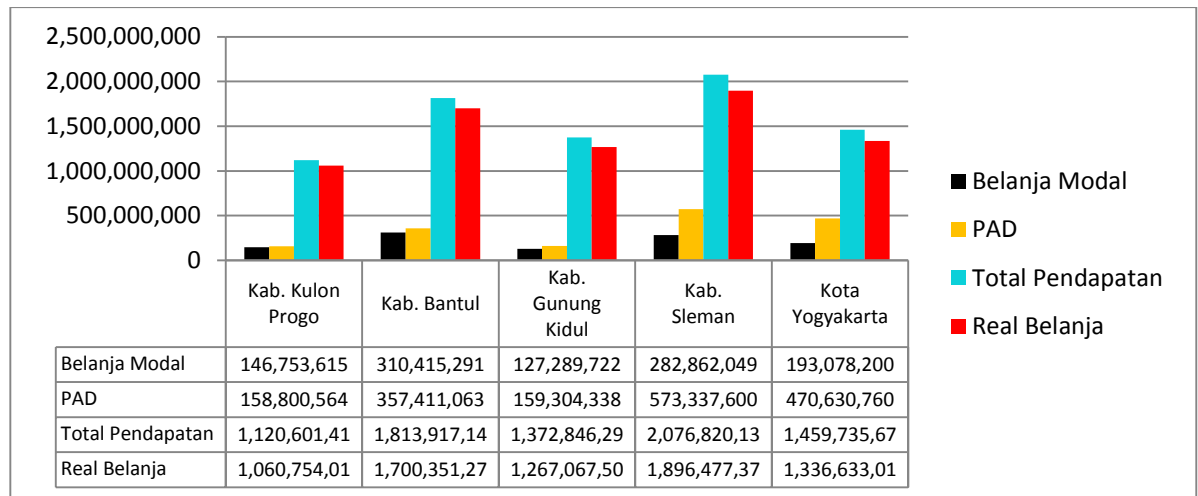
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

D.I. Yogyakarta merupakan daerah sebagai tujuan wisata, daerah yang masih cukup kental budayanya dan tujuan para mahasiswa menimba ilmu. Ada beberapa pembangunan-pembangunan baik dari swasta atau pembenahan dari pemda setempat di beberapa tempat. Namun pembangunan ini tidak merata pada seluruh Kab dan Kota di Provinsi Yogyakarta dikarenakan potensi daerah yang berbeda maupun kemampuan pembangunan fiskal daerah tersebut serta kebijakan pemerintah daerah kabupaten masing-masing.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Pemda Kabupaten dan Kota pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2005 sampai dengan 2014. Subjek penelitian ini adalah setiap pemda Kabupaten dan Kotadi D.I Yogyakarta yang dimana provinsi D.I Yogyakarta memiliki 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman serta Kota Yogyakarta.. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Objek penelitian ini berupa belanja modal (BM), pendapatan asli daerah (PAD), dan kinerja keuangan (KK).



Gambar 4.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja di Kabupaten dan Kota di Yogyakarta
Tahun 2014

Sumber: BPS Yogyakarta

Berdasarkan gambar 4.1 dimana realisasi dari Belanja Modal, PAD, Total Pendapatan dan Belanja daerah pada setiap kabupaten/kota. Dilihat dimana nilai belanja pembangunan atau Belanja Modal tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 310.415.291.000,- yaitu pada Kabupaten Bantul. Nilai pendapatan dan PAD terbesar yaitu 2.076.820.131.000,- dan 573.337.600.000,- yaitu pada Kabupaten Sleman. Namun total belanja terbesar juga diperoleh di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp. 1.896.477.378.000,-. Kabupaten Sleman daerah Provinsi Yogyakarta yang cukup luas. Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tempat berpotensi untuk berinvestasi yang baik ada beberapa Mall besar dan Universitas besar berada di Kabupaten ini. Kabupaten Sleman merupakan perbatasan Yogyakarta dengan kota Magelang Jawa Tengah.

B. Hasil penelitian

1. Kabupaten Kulon Progo

a. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Kabupaten Kulon Progo
(Belanja Modal dan PAD dalam ribuan)

Keterangan		Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Belanja Modal	10	12963815	147830580	90186537,7	44945697,22
PAD	10	24332501	158800564	61098118,2	40130548,97
Rasio Efektivitas	10	0,939	1,711	1,231	0,227851554
Rasio Efisiensi	10	0,798	1,028	0,962	0,064701242
Rasio Kemandirian	10	0,08	0,224	0,112	0,043559915
Rasio Keserasian	10	0,053	0,202	0,131	0,050795395
Rasio Pertumbuhan	10	0,025	0,457	0,149	0,125162915

Dari tabel di atas kita dapat melihat statistik deskriptif belanja modal, PAD serta beberapa rasio kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo. Pada belanja modal memiliki nilai minimal Rp. 12.963.815.000,- pada tahun 2005 dengan nilai maksimal yaitu Rp147.830.580.000,- yang terjadi pada tahun 2012 dimana terjadi penurunan realisasi belanja modal pada tahun 2013 dan 2014. Rata-rata realisasi belanja modal selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 90.186.537.700,- serta standart deviasi sebesar Rp 44.945.697.220,-. Kemudian PAD memiliki nilai minimal Rp. 24.332.501.000,- yang terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal yaitu sebesar 158.800.564.000,- yaitu nilai PAD pada tahun 2014. Rata-rata realisasi PAD selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 61.098.118,200,- serta standart deviasi sebesar Rp 40.130.548.970,-.

Pada kinerja keuangan daerah ada beberapa indikator rasio keuangan yang dapat kita lihat pada tabel diatas. Indikator rasio efektivitas pada Pemda di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan nilai rata-rata 123% nilai yang tinggi sehingga dapat dikatakan pemda Kulon progo memiliki kinerja keuangan baik dari segi efektivitasnya. Rasio efektivitas minimum pada angka 94% yaitu terjadi pada tahun 2009 dan nilai maksimal 171% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio efektivitas Kabupaten Kulon Progo yaitu 23%.

Indikator rasio efesiensi dimanaperbandingan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan dimana semakin kecil belanja daerah dan semakin besar nilai pendapatan daerah pada keuangan pada Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan baik dimana berarti semakin kecil rasio efesiensi dapat dikatakan semakin efesien kinerja keuangan tersebut. pada Pemda di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 96% , dimana dapat dikatakan nilai yang tinggi namun tidak baik atau artinya kinerja keuangan Kabupaten Kulon Progo belum efisien selama 10 tahun tersebut. Rasio efektivitas minimum pada angka 80% yaitu terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal 103% pada tahun 2008. Standar deviasi rasio efektivitas Kabupaten Kulon Progo yaitu 6,5%.

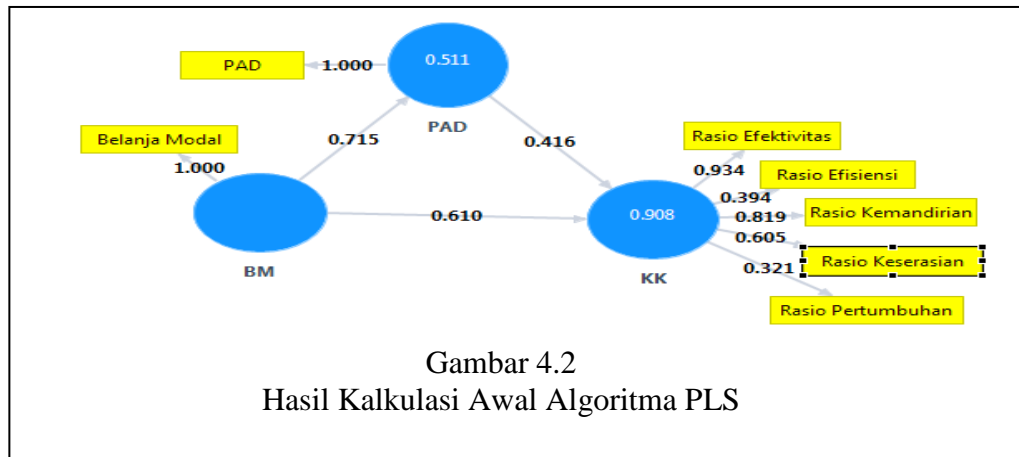
Indikator rasio kemandirian dimana perbandingan antara realisasi PAD daerah terhadap realisasi dana perimbangan. Jika nilai rasio kemandirian semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin tinggi atau baik kinerja keuangan daerah tersebut. Rasio kemandirian pada Pemda di Kabupaten

Kulon Progo menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 11% dimana dapat dikatakan nilai rendah sekali dan mengindikasikan ketergantungan pemda pada dana yang berasal dari pemerintah pusat masih tinggi. Rasio kemandirian minimum pada angka 8% yaitu terjadi pada tahun 2009 dan nilai maksimal 22% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio efektivitas Kabupaten Kulon Progo yaitu 4%.

Indikator Rasio keserasian belanja modal dimana didapatkan dari perbandingan nilai realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja daerah. Pada Kabupaten Kulon Progo nilai rata-rata 10 tahun yaitu 13% dengan standar deviasi 5%. Nilai minimum yaitu 5% terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimum yaitu sebesar 20% pada tahun 2006.

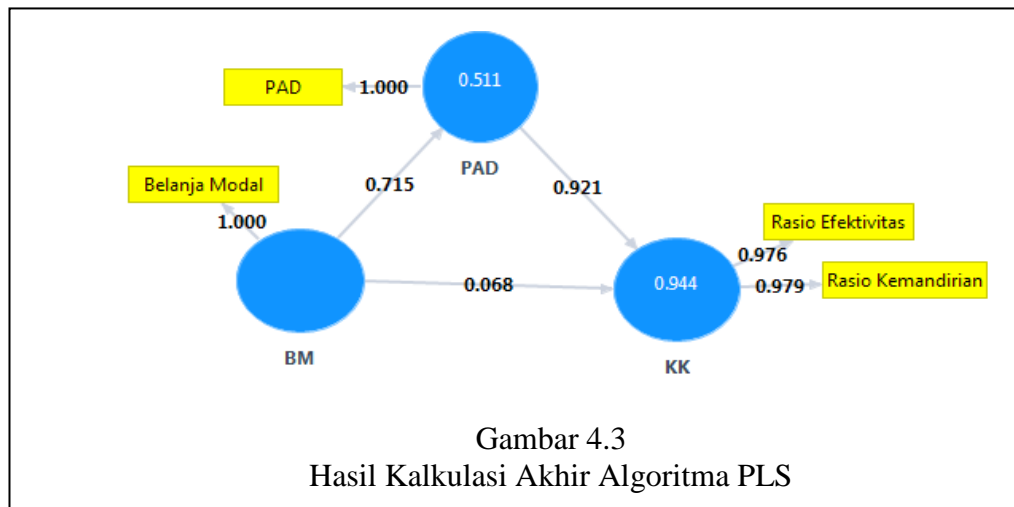
Indikator pertumbuhan dimana nilai rata-rata 10 tahun pertumbuhan kinerja keuangan dari segi pendapatan sebesar 15%. Nilai minimum yaitu 2% yang terjadi pada tahun 2009 dan nilai maksimum nya yaitu sebesar 46 % pada tahun 2006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari indikator pertumbuhan mengalami turun dan naik yang sangat fluktuatif dan salah satunya seharusnya perhatian pemerintah dan perlu di telaah lebih lanjut.

b. Evaluasi Outer Model



Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan ada dibawah angka 0,5 sehingga kedua indikator ini di drop dari model. Setelah di drop rasio keserasian juga dibawah 0,5 sehingga harus di drop dari model. Sementara rasio efektivitas memiliki *loading factor* 0,934 dan rasio kemandirian memiliki *loading factor* 0,829; dimana kedua *loading factor* tersebut $> 0,5$ yang artinya kedua rasio tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan indikator pengukur konstruk Kinerja Keuangan (KK). Setelah indikator rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan di drop dari model, maka dilakukan *calculate algortihm* kembali, berikut hasil kalkulasi akhir algoritma PLS model penelitian ini :



Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas yaitu 0,976 dan rasio kemandirian 0,979. Sehingga dapat dinyatakan konstruk Kinerja Keuangan (KK) sudah memenuhi uji *Convergent Validity* karena *loading factornya* $>0,5$. Selain uji *Convergent Validity*, konstruk dengan indikator reflektif juga dapat diuji *Discriminant Validity* dengan melihat *cross loading*, seperti tabel di bawah ini

Tabel 4.2
Discriminat Validity Cross loadings

	BM	KK	PAD
Belanja Modal	1.000	0.727	0.715
PAD	0.715	0.970	1.000
Rasio Efektivitas	0.787	0.976	0.911
Rasio Kemandirian	0.638	0.979	0.983

Sumber : Hasil olah data PLS

Cross loadings berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki *discriminant validity* yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jika korelasi indikator konstruk yang dituju memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka

dikatakan konstruk memiliki *discriminant validity* yang tinggi. Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat bagaimana nilai *loading factor* dari indikator yaitu rasio efektivitas dan kemandirian terhadap konstruk yang dituju yaitu kinerja keuangan (KK). Gambar diatas menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas mempunyai *loading factor* kepada KK yaitu 0,976 yang lebih tinggi dari pada *loading factor* kepada BM (0,787), dan PAD (0,911), hal ini serupa juga tampak pada indikator rasio kemandirian.

Tabel 4.3
Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
BM	1.000
KK	0.955
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan yaitu diatas 0,5. Dari gambar diatas kita dapat mengetahui nilai AVE diatas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian.

Tabel 4.4
Composite Reliability

	Composite Reliability
BM	1.000
KK	0.977
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Uji reliability dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7. Pada gambar hasil

analisis PLS semua nilai koefisien >0,7 sehingga konstruk pada model memenuhi kriteria.

c. Evaluasi Inner Model atau Pengujian Hipotesis

Setelah mengevaluasi outer model selanjutnya adalah evaluasi pada inner model sekaligus uji hipotesis model penelitian ini. Evaluasi inner model dan uji hipotesis model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
R square

	R Square
KK	0.944
PAD	0.511

Sumber : Olah data PLS

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa konstruk PAD dapat diterangkan oleh konstruk variabel Belanja Modal (BM) sebesar 51,1% sementara 48,9% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Konstruk variabel kinerja keuangan (KK) dapat diterangkan oleh konstruk PAD dan Belanja Modal sebesar 94,4% sementara 5,6% variabel kinerja keuangan diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.6
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O /STERR)
BM -> KK	0.068	0.105	0.235	0.291
BM -> PAD	0.715	0.729	0.132	5.408
PAD -> KK	0.921	0.865	0.217	4.239

Sumber : Hasil olah data bootstrapping PLS

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t statistik yang diperoleh untuk penelitian ini. Batas nilai t untuk menolak dan

menerima hipotesis yang diajukan yaitu 1,89. untuk Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan.

Nilai uji t diperoleh analisis PLS untuk belanja modal terhadap Kinerja keuangan (KK) pada Kabupaten Kulon Progo yaitu 0,320 dimana $0,320 < 1,89$ dimana dari hasil tersebut menyatakan bahwa belanja modal tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga **hipotesis 1 (H1) ditolak**.

Hasil pengujian PLS mengenai pengaruh variabel belanja modal terhadap PAD memiliki koefisien dengan arah positif dengan nilai t 8,168. Nilai t 8,168 tersebut lebih besar dari t tabel 1,89 dimana bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD, karena dengan meningkatnya PAD pemerintah dapat memenuhi pembiayaan untuk belanja daerahnya sendiri, dan semakin mandiri dalam keuangan serta tidak bergantung kepada bantuan pemerintah pusat.

Pengujian hipotesis H6 dimana menguji pengaruh tidak langsung dari belanja daerah (BM) terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Jalur dan *Standart Error*

	P	SE
BM -> PAD	0,715	0,088
PAD -> KK	0,921	0,241

Dari hasil tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Sobel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Rumus Sobel

	$P_1.P_2$	$P_1^2.SE_2^2$	$P_2^2.SE_1^2$	$SE_1^2.SE_2^2$	Sp_1SP_2	t
BM -> PAD -> KK	0,658515	0,029692	0,006569	0,00045	0,191601	3,436905

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD tidak dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t dari hasil hitung lebih besar yaitu sebesar 3,436905 dengan demikian **hipotesis 6 (H6) diterima**.

2. Kabupaten Bantul

a. Statistik Deskriptif

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Kabupaten Bantul
(Belanja Modal dan PAD dalam juta)

Keterangan		Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Belanja Modal	10	29035706	310415291	149702061	91797901,11
PAD	10	37683848	357411063	125615127	100343613,2
Rasio Efektivitas	10	0,905	1,221	1,239	0,158371387
Rasio Efisiensi	10	0,909	1,026	0,964	0,045715623
Rasio Kemandirian	10	0,079	0,345	0,158	0,082576301
Rasio Keserasian	10	0,069	0,29	0,142	0,060072959
Rasio Pertumbuhan	10	-0,138	0,406	0,162	0,156007055

Dari tabel di atas kita dapat melihat statistik deskriptif belanja modal, PAD serta beberapa rasio kinerja keuangan pada Kabupaten Bantul. Pada belanja modal memiliki nilai minimal Rp. 29.035.706.000,- pada tahun 2005 dengan nilai maksimal yaitu Rp. 310.415.219.000,- yang terjadi pada tahun 2014. Rata-rata realisasi belanja modal selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 149.702.061.000,- serta standart deviasi sebesar Rp 91.797.901.110,-.

Kemudian PAD memiliki nilai minimal Rp. 37.683.848.000,- yang terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal yaitu sebesar Rp. 357.411.063.000,- yaitu nilai PAD pada tahun 2014. Rata-rata realisasi PAD selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 125.615.127.000,- serta standart deviasi sebesar Rp 100.343.613.200,-.

Pada kinerja keuangan daerah ada beberapa indikator rasio keuangan yang dapat kita lihat pada tabel diatas. Indikator rasio efektivitas pada Pemda di Kabupaten Bantul menunjukkan nilai rata-rata 124% nilai yang tinggi sehingga dapat dikatakan pemda Kabupaten Bantul memiliki kinerja keuangan baik dari segi efektivitasnya. Rasio efektivitas minimum pada angka 90,5% yaitu terjadi pada tahun 2010 dan nilai maksimal 124% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio efektivitas Kabupaten Bantul yaitu 16%.

Indikator rasio efesiensi dimana perbandingan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan dimana semakin kecil belanja daerah dan semakin besar nilai pendapatan daerah pada keuangan pada Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik dimana berarti semakin kecil rasio efesien dapat dikatakan semakin baik kinerja keuangan tersebut. Pada Pemda di Kabupaten Bantul menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 96% , dimana dapat dikatakan nilai yang tinggi namun tidak baik atau artinya kinerja keuangan Kabupaten Bantul belum efisien selama 10 tahun tersebut. Rasio efesiensi minimum pada angka 90% yaitu terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimal 103% pada tahun 2010. Standar deviasi rasio efesiensi Kabupaten Bantul yaitu 46%.

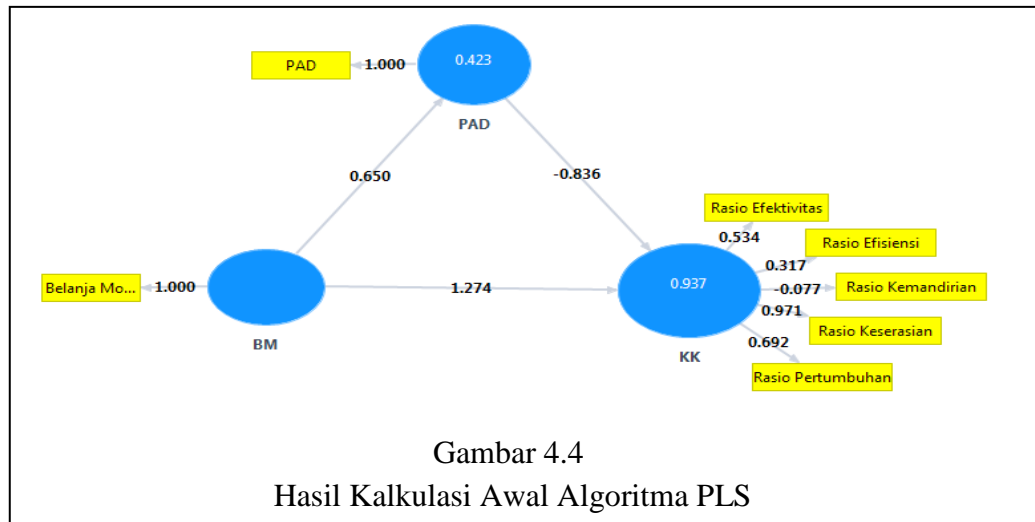
Indikator rasio kemandirian dimana perbandingan antara realisasi PAD daerah terhadap realisasi dana perimbangan. Jika nilai rasio kemandirian semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut. Rasio kemandirian pada Pemda di Kabupaten Bantul menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 16% dimana dapat dikatakan nilai rendah dan mengindikasikan ketergantungan pemda pada dana yang berasal dari pemerintah pusat masih tinggi. Rasio kemandirian minimum pada angka 8% yaitu terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimal 35% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio kemandirian Kabupaten Bantul yaitu 8%.

Rasio Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya. Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio yang ideal untuk keserasian, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio keserasian pada Pemda di Kabupaten Bantul menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 14%. Nilai minimum rasio keserasian pada angka 7% yaitu terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal 29% pada tahun 2008. Standar deviasi rasio keserasian Kabupaten Bantul yaitu 6%.

Rasio pertumbuhan tahun ke-n merupakan perhitungan pendapatan pada tahun tersebut (P_n) dikurangi pendapatan tahun sebelumnya (P_o) lalu dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya (P_o). Rasio pertumbuhan pada Pemda di Kabupaten Bantul menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 16%. Nilai minimum rasio keserasian pada angka -14% yaitu terjadi

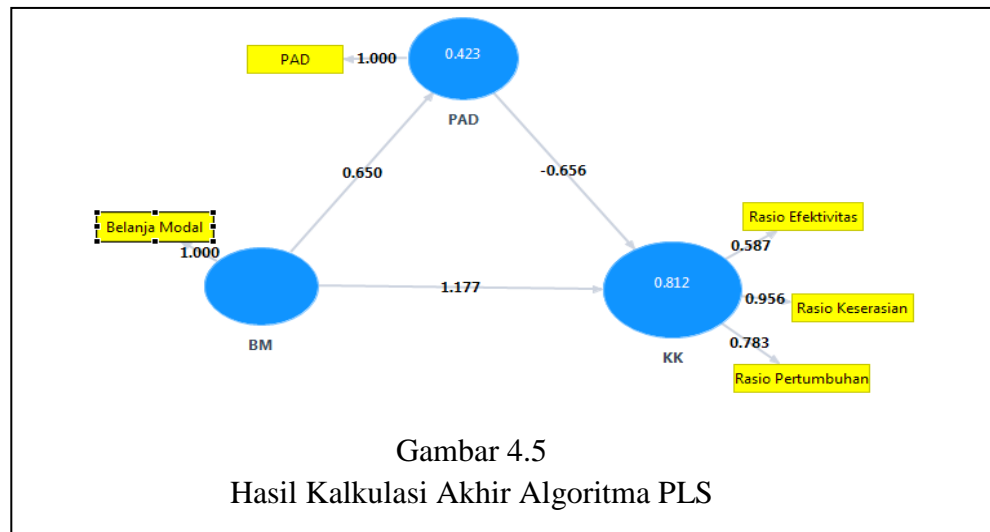
pada tahun 2009 dan nilai maksimal 36% pada tahun 2006. Standar deviasi rasio keserasian Kabupaten Bantul yaitu 15%.

b. Evaluasi Outer Model



Sumber : Hasil olah data PLS

Kinerja Keuangan (KK) merupakan indikator reflektif. Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efisiensi, rasio kemandirian ada dibawah angka 0,5 sehingga kedua indikator ini di drop dari model. Sementara rasio efektivitas memiliki *loading factor* 0,534; rasio keserasian memiliki 0,971; dan rasio pertumbuhan memiliki *loading factor* 0,692; dimana ketiga *loading factor* tersebut > 0,5 yang artinya kedua rasio tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan indikator pengukur konstruk Kinerja Keuangan (KK). Setelah indikator rasio efisiensi dan rasio kemandirian di drop dari model, maka dilakukan *calculate algorithm* kembali, berikut hasil kalkulasi akhir algoritma PLS model penelitian ini :



Sumber : Hasil olah data algoritma PLS

Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas yaitu 0,587; rasio keserasian 0,956; dan rasio kemandirian 0,78. Dari hasil *loading factor* yang dapat dilihat dapat dinyatakan konstruk Kinerja Keuangan (KK) sudah memenuhi uji *Convergent Validity* karena *loading factor*nya $>0,5$. Selain uji *Convergent Validity*, konstruk dengan indikator reflektif juga dapat diuji *Discriminant Validity* dengan melihat *cross loading*, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.10
Discriminant Validity Cross loadings

	BM	KK	PAD
Belanja Modal	1.000	0.751	0.650
PAD	0.650	0.110	1.000
Rasio Efektivitas	0.439	0.587	0.191
Rasio Keresasian	0.808	0.956	0.113
Rasio Pertumbuhan	0.439	0.783	-0.020

Sumber : Hasil olah data algoritma PLS

Cross loadings berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki *discriminant validity* yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan

korelasi indikator suatu konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jika korelasi indikator konstruk yang dituju memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki *discriminant validity* yang tinggi. Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat bagaimana nilai *loading factor* dari indikator yaitu rasio efektivitas, rasiokeserasian dan pertumbuhan terhadap konstruk yang dituju yaitu kinerja keuangan (KK). *Loading factor* untuk indikator rasio efektivitas kepada KK yaitu 0,587 yang lebih tinggi dari pada *loading factor* kepada BM (0,2439), dan PAD (0,191), hal ini serupa juga tampak pada indikator lain yaitu keserasian dan rasio pertumbuhan terhadap konstruk KK.

Tabel 4.11
Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
BM	1.000
KK	0.624
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Metode lain untuk melihat dscriminant validity adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted (AVE)*. Nilai yang disarankan yaitu diatas 0,5. Dari gambar diatas kita dapat mengetahui nilai AVE diatas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian.

Tabel 4.12
Composite Reliability

	Composite Reliability
BM	1.000
KK	0.827
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliabilitas* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7. Pada gambar hasil analisis PLS semua nilai konstruk $>0,7$ sehingga konstruk pada model memenuhi kriteria.

c. Evaluasi Inner Model atau Pengujian Hipotesis

Setelah mengevaluasi outer model selanjutnya adalah evaluasi pada inner model sekaligus uji hipotesis model penelitian ini. Evaluasi inner model dan uji hipotesis model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
R Square

	R Square
KK	0.812
PAD	0.423

Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa konstruk PAD dapat diterangkan oleh konstruk variabel Belanja Modal (BM) sebesar 42,3% sementara 57,7% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Konstruk variabel kinerja keuangan (KK) dapat diterangkan oleh konstruk PAD dan Belanja Modal sebesar 81,2% sementara 18,8% variabel kinerja keuangan diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.14
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
BM -> KK	1.177	1.572	1.122	1.049
BM -> PAD	0.650	0.622	0.305	2.131
PAD -> KK	-0.656	-1.061	1.147	0.572

Sumber : Hasil olah data bootstrapping PLS

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t statistik yang diperoleh untuk penelitian ini. Batas nilai t untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu 1,89. Untuk Pengujian hipotesis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan.

Nilai uji t diperoleh analisis PLS untuk belanja modal terhadap Kinerja keuangan (KK) pada Kabupaten Bantul yaitu 1,069 dimana $1,069 < 1,89$ dimana dari hasil tersebut menyatakan bahwa belanja modal tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga **hipotesis 2 (H2) ditolak**.

Hasil pengujian PLS mengenai pengaruh variabel belanja modal terhadap PAD memiliki koefisien dengan arah positif dengan nilai t 2,163. Nilai t 2,163 tersebut lebih besar dari t tabel 1,89 dimana bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan PAD, karena dengan meningkatnya PAD pemerintah dapat memenuhi pembiayaan untuk belanja daerahnya sendiri, dan semakin mandiri dalam keuangan serta tidak bergantung kepada bantuan pemerintah pusat.

Pengujian hipotesis 7 dimana menguji pengaruh tidak langsung dari belanja daerah (BM) terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Tabel 4.15
Hasil Koefisien Jalur dan *Standart Error*

	P	SE
BM -> PAD	0,65	0,301
PAD -> KK	-0,656	1,171

Dari hasil tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Sobel sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Perhitungan Rumus Sobel

	$P_1.P_2$	$P_1^2.SE_2^2$	$P_2^2.SE_1^2$	$SE_1^2.SE_2^2$	Sp_1SP_2	t
BM -> PAD -> KK	-0,4264	0,579349	0,038989	0,124236	0,861727	-0,49482

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD tidak dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t dari hasil hitung lebih kecil dari pada 1,89 dengan demikian **hipotesis 7 (H7) ditolak**.

3. Kabupaten Gunung Kidul

a. Statistik Deskriptif

Tabel 4.17
Statistik Deskriptif Kabupaten Gunung Kidul
(Belanja Modal dan PAD dalam juta)

Keterangan		Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Belanja Modal	10	26647520	164360941	115193048,4	39015086,77
PAD	10	2418455	159304338	56101688,6	40831125,01
Rasio Efektivitas	10	1,033	1,764	1,235	0,210002296
Rasio Efisiensi	10	0,46	1,042	0,92	0,164417564
Rasio Kemandirian	10	0,054	0,172	0,081	0,034771938
Rasio Keserasian	10	0,079	0,248	0,155	0,054302726
Rasio Pertumbuhan	10	-0,284	1,164	0,211	0,433392094

Dari tabel di atas kita dapat melihat statistik deskriptif belanja modal, PAD serta beberapa rasio kinerja keuangan pada Kabupaten Gunung Kidul. Pada belanja modal memiliki nilai minimal Rp. 26.647520.000,- pada tahun 2005 dengan nilai maksimal yaitu Rp. 164.360.941.000,- yang terjadi pada tahun 2012 dimana terjadi penurunan realisasi belanja modal pada tahun

2013 dan 2014. Rata-rata realisasi belanja modal selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 115.193.048.400,- serta standart deviasi sebesar Rp 39.015086.770,-. Kemudian PAD memiliki nilai minimal Rp. 24.187.455.000,- yang terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal yaitu sebesar 159.304338,- yaitu nilai PAD pada tahun 2014. Rata-rata realisasi PAD selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 56.101.688.000,- serta standart deviasi sebesar Rp 40.831.125.010,-.

Pada penilaian untuk variabel kinerja keuangan daerah kita dapat melihat beberapa indikator rasio keuangan pada tabel diatas. Indikator rasio efektivitas pada Pemda di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan nilai rata-rata 123,5% nilai yang tinggi sehingga dapat dikatakan pemda Gunung Kidul memiliki kinerja keuangan baik dari segi efektivitasnya. Rasio efektivitas minimum pada angka 103% yaitu terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal 176% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio efektivitas Kabupaten Gunung Kidul yaitu 21%.

Indikator rasio efesiensi yaitu perbandingan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan dimana semakin kecil belanja daerah dan semakin besar nilai pendapatan daerah pada keuangan pada Kabupaten Gunung kidul dapat dikatakan baik dimana berarti semakin kecil rasio efesiensi dapat dikatakan semakin efesien kinerja keuangan tersebut. pada Pemda di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 92% , dimana dapat dikatakan nilai yang tinggi yang berarti tidak baik atau kinerja keuangan Kabupaten Gunung Kidul belum efisien selama 10

tahun tersebut. Rasio efisien minimum pada angka 46% yaitu terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal 104% pada tahun 2008. Standar deviasi rasio efisiensi Kabupaten Gunung kidul yaitu 16 %.

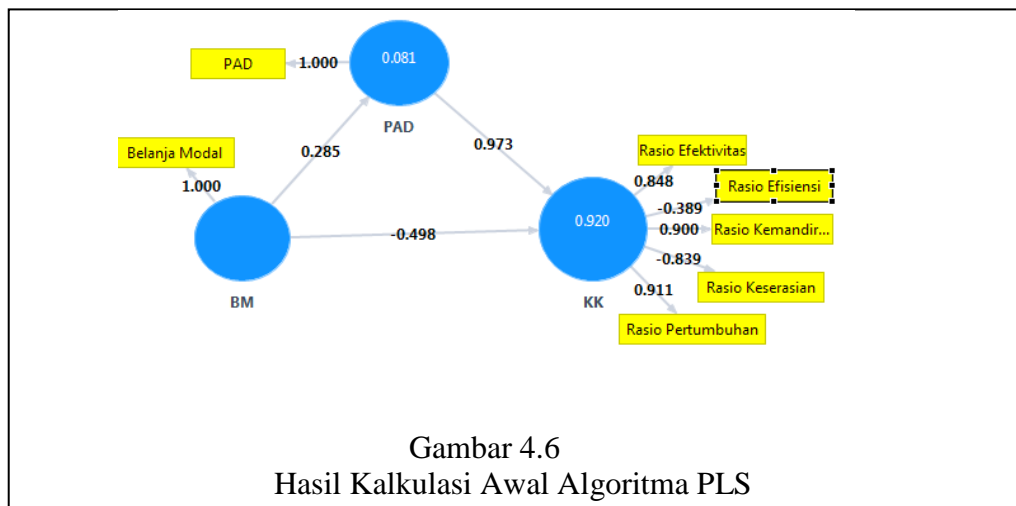
Indikator rasio kemandirian dimana perbandingan antara realisasi PAD daerah terhadap realisasi dana perimbangan. Jika nilai rasio kemandirian semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin tinggi atau baik kinerja keuangan daerah tersebut. Rasio kemandirian pada Pemda di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 8% dimana dapat dikatakan nilai rendah sekali dan mengindikasikan ketergantungan pemda pada dana yang berasal dari pemerintah pusat masih tinggi. Rasio kemandirian minimum pada angka 5% yaitu terjadi pada tahun 2007 dan nilai maksimal 17% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio efektivitas Kabupaten Gunung Kidul yaitu 3.5%.

Indikator Rasio keserasian belanja modal dimana didapatkan dari perbandingan nilai realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja daerah. Pada Kabupaten Gunung Kidul nilai rata-rata 10 tahun yaitu 15,5% dengan standar deviasi 5%. Nilai minimum yaitu 8% terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimum yaitu sebesar 20% pada tahun 2013.

Indikator pertumbuhan dimana nilai rata-rata 10 tahun pertumbuhan kinerja keuangan dari segi pendapatan sebesar 15%. Nilai minimum yaitu -3% yang terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimum nya yaitu sebesar 116 % pada tahun 2005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari indikator pertumbuhan mengalami turun dan naik yang sangat fluktuatif dan

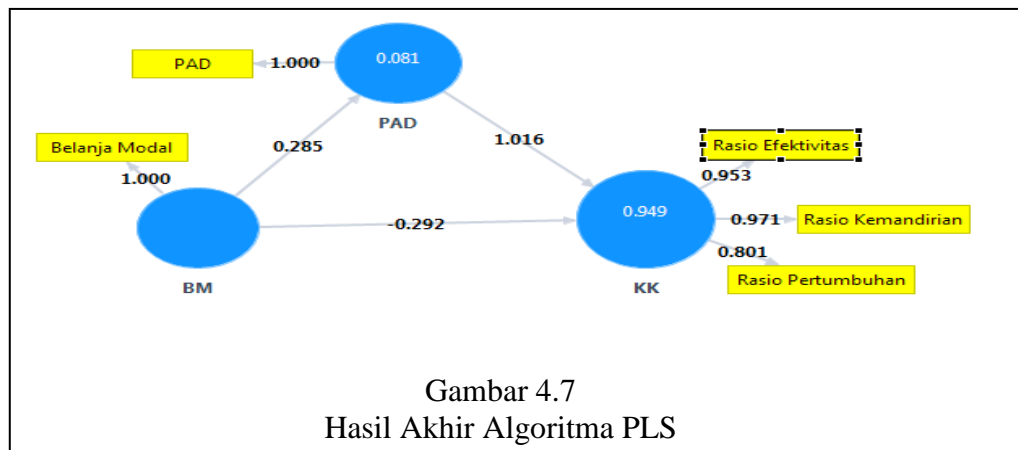
salah satu yang seharusnya perhatian pemerintah dan perlu di telaah lebih lanjut

b. Evaluasi Outer Model



Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efisiensi dan rasio keserasian ada dibawah angka 0,5 sehingga kedua indikator ini di drop dari model. Setelah di drop rasio pertumbuhan juga dibawah 0,5 sehingga harus di drop dari model. Sementara rasio efektivitas memiliki *loading factor* 0,848; rasio kemandirian memiliki *loading factor* 0,900; dan rasio pertumbuhan memiliki *loading factor* 0,911. Dimana ketiga *loading factor* tersebut $> 0,5$ yang artinya kedua rasio tersebut memenuhi isyarat untuk dijadikan indikator pengukur konstruk Kinerja Keuangan (KK). Setelah indicator rasio efisiensi dan rasio keserasian di drop dari model, makadilakukan *calculate algorithm* kembali, berikut hasil kalkulasi akhir algoritma PLS model penelitian ini :



Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas yaitu 0,953; rasio kemandirian yaitu 0,971; dan rasio pertumbuhan 0,801, sehingga dapat dinyatakan konstruk Kinerja Keuangan (KK) sudah memenuhi uji *Convergent Validity* karena *loading factornya* $>0,5$. Selain uji *Convergent Validity*, konstruk dengan indikator reflektif juga dapat diuji *Discriminant Validity* dengan melihat *cross loading*, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Discriminant Validity Cross Loadings

	BM	KK	PAD
Belanja Modal	1.000	-0.003	0.285
PAD	0.285	0.933	1.000
Rasio Efektivitas	0.200	0.953	0.950
Rasio Kemandirian	0.151	0.971	0.988
Rasio Pertumbuhan	-0.474	0.801	0.555

Sumber : Hasil olah data PLS

Cross loadings berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki *discriminant validity* yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jika korelasi indikator konstruk yang dituju memiliki nilai lebih tinggi

dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki *discriminant validitas* yang tinggi. Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat bagaimana nilai *loading factor* dari indikator yaitu rasio efektivitas dan kemandirian terhadap konstruk yang dituju yaitu kinerja keuangan (KK). Gambar diatas menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas mempunyai *loading factor* kepada KK yaitu 0,953 yang lebih tinggi dari pada *loading factor* kepada BM (0,200), dan PAD (0,950), hal ini serupa juga tampak pada indikator rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan.

Tabel 4.19
Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
BM	1.000
KK	0.830
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan yaitu diatas 0,5. Dari gambar diatas kita dapat mengetahui nilai AVE diatas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian.

Tabel 4.20
Composite Reliability

	Composite Reliability
BM	1.000
KK	0.936
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa konstruk KK memiliki *Composite Reliability* >0,7 dimana nilai tersebut artinya konstruk KK dapat dinyatakan reliabel.

c. Evaluasi Inner Model atau Pengujian Hipotesis

Setelah seluruh outer model dievaluasi selanjutnya adalah evaluasi pada inner model sekaligus uji hipotesis model penelitian ini. Evaluasi inner model dan uji hipotesis model penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
R Square

	R Square
KK	0.949
PAD	0.081

Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa konstruk PAD dapat diterangkan oleh konstruk variabel Belanja Modal (BM) sebesar 8,1% sementara 91,9% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Konstruk variabel kinerja keuangan (KK) dapat diterangkan oleh konstruk PAD dan Belanja Modal sebesar 94,9% sementara 5,1% variabel kinerja keuangan diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.22
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
BM -> KK	-0.292	-0.219	0.311	0.937
BM -> PAD	0.285	0.410	0.292	0.973
PAD -> KK	1.016	0.944	0.228	4.450

Sumber : Hasil olah data bootstrapping PLS

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t statistik yang diperoleh untuk penelitian ini. Batas nilai t untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu 1,89. Untuk Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan.

Nilai uji t diperoleh analisis PLS untuk belanja modal terhadap Kinerja keuangan (KK) pada Kabupaten Gunung Kidul yaitu 0,937 dimana $0,937 < 1,89$ dimana dari hasil tersebut menyatakan bahwa belanja modal tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga **hipotesis 3 (H3) ditolak**.

Hasil pengujian PLS mengenai pengaruh variabel belanja modal terhadap PAD memiliki koefisien dengan arah positif dengan nilai t 4.450. Nilai t 4.450 tersebut lebih besar dari t tabel 1,89 dimana bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Pengujian hipotesis 8 (H8) dimana menguji pengaruh tidak langsung dari belanja daerah (BM) terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Tabel 4.23
Hasil Koefisien Jalur dan Standart Error

	P	SE
BM -> PAD	0,285	0,292
PAD -> KK	1,016	0,218

Dari hasil tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Sobel sebagai berikut :

Tabel 4.24
Hasil Perhitungan Rumus Sobel

	$P_1.P_2$	$P_1^2.SE_2^2$	$P_2^2.SE_1^2$	$SE_1^2.SE_2^2$	Sp_1SP_2	t
BM -> PAD -> KK	0,28956	0,004222	0,088014	0,004432	0,310916	0.931311

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD tidak dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t dari hasil hitung lebih kecil dari pada 1,89 dengan demikian **hipotesis 8 (H8) ditolak**.

4. Kabupaten Sleman

a. Statistik Deskriptif

Tabel 4.25
Statistik Deskriptif Kabupaten Sleman
(Belanja Modal dan PAD dalam juta)

Keterangan		Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Belanja Modal	10	77904743	573337600	229677968	65409932,83
PAD	10	417413902	1034404523	750573634	164776251,1
Rasio Efektivitas	10	1,002	1,506	1,281	0,151845331
Rasio Efisiensi	10	0,609	1,033	0,885	0,145677314
Rasio Kemandirian	10	0,148	0,554	0,28	0,130680788
Rasio Keserasian	10	0,075	0,215	0,125	0,040125859
Rasio Pertumbuhan	10	-0,151	1,034	0,21	0,309804592

Dari tabel di atas kita dapat melihat statistik deskriptif belanja modal, PAD serta beberapa rasio kinerja keuangan pada Kabupaten Sleman. Pada belanja modal memiliki nilai minimal Rp. 77.904.743.000,- pada tahun 2005 dengan nilai maksimal yaitu Rp. 573.337.600,- yang terjadi pada tahun 2014. Rata-rata realisasi belanja modal selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 229.677.968.000,- serta standart deviasi sebesar Rp 65.409.932.830,-. Kemudian PAD memiliki nilai minimal Rp. 417.413.902.000,- yang terjadi

pada tahun 2005 dan nilai maksimal yaitu sebesar 1.034.404.523.000,- yaitu nilai PAD pada tahun 2014. Rata-rata realisasi PAD selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 750.573.634.000,- serta standart deviasi sebesar Rp. 164.776.251.100 ,-

Pada kinerja keuangan daerah ada beberapa indikator rasio keuangan yang dapat kita lihat pada tabel diatas. Indikator rasio efektivitas pada Pemda di Kabupaten Sleman menunjukkan nilai rata-rata 128% nilai yang sangat tinggi sehingga dapat dikatakan pemda Kabupaten Sleman memiliki kinerja keuangan baik dari segi efektivitasnya. Rasio efektivitas minimum pada angka 100% yaitu terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimal 151% pada tahun 2013. Standar deviasi rasio efektivitas Kabupaten Kulon Progo yaitu 15%.

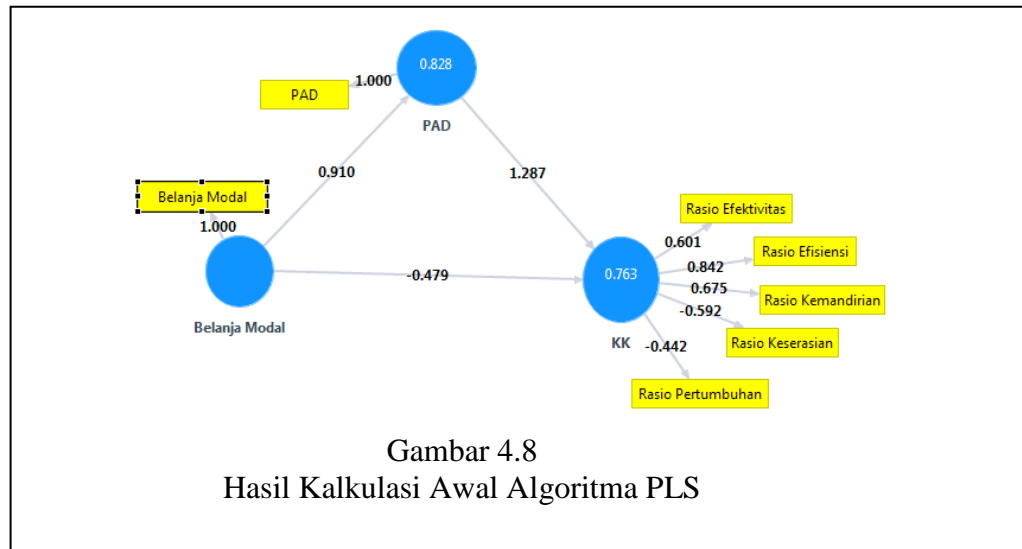
Indikator rasio efesiensi dimana perbandingan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan dimana semakin kecil belanja daerah dan semakin besar nilai pendapatan daerah pada keuangan pada Kabupaten Sleman dapat dikatakan baik dimana berarti semakin kecil rasio efesien dapat dikatakan semakin baik kinerja keuangan tersebut. pada Pemda di Kabupaten Sleman menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 88% , dimana dapat dikatakan nilai yang tinggi namun tidak baik atau artinya kinerja keuangan Kabupaten Sleman belum efisien selama 10 tahun tersebut. Rasio efesiensi minimum pada angka 61% yaitu terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimal 103% pada tahun 2010. Standar deviasi rasio efesiensi Kabupaten Sleman yaitu 14%.

Indikator rasio kemandirian dimana perbandingan antara realisasi PAD daerah terhadap realisasi dana perimbangan. Jika nilai rasio kemandirian semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut. Rasio kemandirian pada Pemda di Kabupaten Sleman menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 28% dimana dapat dikatakan nilai yang rendah dimana mengindikasikan bahwa pemda Kabupaten Sleman memiliki pendapatan asli daerah yang kurang dan masih bergantung terhadap dana dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian minimum pada angka 14% yaitu terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimal 55% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio kemandirian Kabupaten Sleman yaitu 13%.

Indikator Rasio keserasian belanja modal dimana didapatkan dari perbandingan nilai realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja daerah. Pada Kabupaten Sleman nilai rata-rata 10 tahun yaitu 12,5% dengan standar deviasi 4%. Nilai minimum yaitu 7,5% terjadi pada tahun 2011 dan nilai maksimum yaitu sebesar 21,5% pada tahun 2006.

Indikator pertumbuhan dimana nilai rata-rata 10 tahun pertumbuhan kinerja keuangan dari segi pendapatan sebesar 21%. Nilai minimum yaitu -15% yang terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimum nya yaitu sebesar 103% pada tahun 2005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari indikator pertumbuhan mengalami turun dan naik yang sangat fluktuatif dan salah satunya seharusnya perhatian pemerintah dan perlu di telaah lebih lanjut.

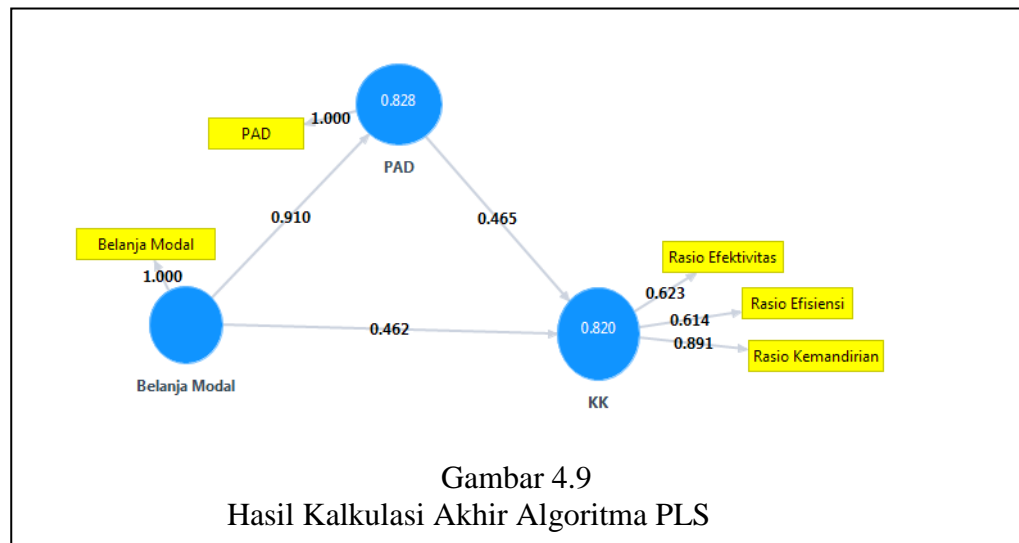
b. Evaluasi Outer Model



Gambar 4.8
Hasil Kalkulasi Awal Algoritma PLS

Sumber : Hasil olah data PLS

Kinerja Keuangan (KK) merupakan indikator reflektif. Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator keserasian dan rasio pertumbuhan ada dibawah angka 0,5 sehingga kedua indikator ini di drop dari model. Sementara rasio efektivitas memiliki 0,601, rasio efesiensi memiliki 0,842 dan rasio kemandirian memiliki *loading factor* 0,675; dimana kedua *loading factor* tersebut $> 0,5$ yang artinya kedua rasio tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan indikator pengukur konstruk Kinerja Keuangan (KK). Setelah indikator rasio keserasian dan rasio pertumbuhan di drop dari model, maka dilakukan *calculate algortihm* kembali, berikut hasil kalkulasi akhir algoritma PLS model penelitian ini :



Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas yaitu 0,623, rasio efisiensi yaitu 0,614, dan rasio kemandirian 0,891; sehingga dapat dinyatakan konstruk Kinerja Keuangan (KK) sudah memenuhi uji *Convergent Validity* karena *loading factornya* $>0,5$. Selain uji *Convergent Validity*, konstruk dengan indikator reflektif juga dapat diuji *Discriminant Validity* dengan melihat cross loading, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.26
Discriminant Validity Cross Loadings

	Belanja Modal	KK	PAD
Belanja Modal	1.000	0.885	0.910
PAD	0.910	0.885	1.000
Rasio Efektivitas	0.290	0.623	0.380
Rasio Efisiensi	0.272	0.614	0.491
Rasio Kemandirian	0.993	0.891	0.872

Sumber : Hasil olah data PLS

Cross loadings berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki *discriminant validity* yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jika

korelasi indikator konstruk yang dituju memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki *discriminant validity* yang tinggi. Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat bagaimana nilai loading factor dari indikator yaitu rasio efektivitas, rasio efesiensi dan kemandirian terhadap konstruk yang dituju yaitu kinerja keuangan (KK). Gambar diatas menunjukkan bahwa loading factor untuk indikator rasio efektivitas mempunyai loading factor kepada KK yaitu 0,623 yang lebih tinggi dari pada loading factor kepada BM (0,290), dan PAD (0,380), hal ini serupa juga tampak pada indikator rasio efesiensi. Namun berbeda dengan rasio kemandirian, penilaian loading factor cross loadings pada *discriminant validity* dianggap tidak baik karena nilai loadings factor tertinggi pada Belanja modal yaitu 0,993 dan konstruk yang dituju yaitu KK 0,891.

Tabel 4.27
Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
Belanja Modal	1.000
KK	0.520
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan yaitu diatas 0,5. Dari gambar diatas kita dapat mengetahui nilai AVE diatas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian.

Tabel 4.28
Composite Reliability

	Composite Reliability
Belanja Modal	1.000
KK	0.759
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Uji reliability dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil composite reliability akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7. Pada gambar hasil analisis PLS semua nilai konstruk >0,7 sehingga konstruk pada model memenuhi kriteria.

c. Evaluasi Inner Model atau Pengujian Hipotesis

Setelah mengevaluasi outer model selanjutnya adalah evaluasi pada inner model sekaligus uji hipotesis model penelitian ini. Evaluasi inner model dan uji hipotesis model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
R Square

	R Square
KK	0.820
PAD	0.828

Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa konstruk PAD dapat diterangkan oleh konstruk variabel Belanja Modal (BM) sebesar 82,8 % sementara 17,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Konstruk variabel kinerja keuangan (KK) dapat diterangkan oleh konstruk PAD dan

Belanja Modal sebesar 82% sementara 18% variabel kinerja keuangan diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.30
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O /STERR)
Belanja Modal -> KK	0.462	0.146	1.575	0.293
Belanja Modal -> PAD	0.910	0.930	0.033	27.682
PAD -> KK	0.465	0.687	1.453	0.320

Sumber : Hasil olah data bootstrapping PLS

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t statistik yang diperoleh untuk penelitian ini. Batas nilai t untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu 1,89. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan.

Nilai uji t diperoleh analisis PLS untuk belanja modal terhadap Kinerja keuangan (KK) pada Kabupaten Sleman yaitu 0,477 dimana $0,477 < 1,89$ dimana dari hasil tersebut menyatakan bahwa belanja modal tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga **hipotesis 4 (H4) ditolak**.

Hasil pengujian PLS mengenai pengaruh variabel belanja modal terhadap PAD memiliki koefisien dengan arah positif dengan nilai t 26,942. Nilai t 26,942 tersebut lebih besar dari t tabel 1,89 dimana bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD, karena dengan meningkatnya PAD pemerintah dapat memenuhi pembiayaan untuk belanja daerahnya sendiri, dan semakin mandiri dalam keuangan serta tidak bergantung kepada bantuan pemerintah pusat.

Pengujian hipotesis 9 (H9) dimana menguji pengaruh tidak langsung dari belanja daerah (BM) terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Tabel 4.31
Hasil Koefisien Jalur dan Standart Error

	P	SE
BM -> PAD	0,91	0,033
PAD -> KK	0,465	1,453

Dari hasil tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Sobel sebagai berikut :

Tabel 4.32
Hasil Perhitungan Rumus Sobel

	$P_1.P_2$	$P_1^2.SE_2^2$	$P_2^2.SE_1^2$	$SE_1^2.SE_2^2$	Sp_1SP_2	T
BM -> PAD -> KK	0,42315	1,748292	0,000235	0,002299	1,323188	0,319796

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD tidak dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t dari hasil hitung lebih kecil dari pada 1,89 dengan demikian **hipotesis 9 ditolak**.

5.Kota Yogyakarta

a.Statistik Deskriptif

Gambar 4.33
Statistik Deskriptif Kota Yogyakarta
(Belanja Modal dan PAD dalam juta)

Keterangan		Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Belanja Modal	10	14556260	193078200	95862791	52219273,78
PAD	10	89196420	470630760	219444516	133306692,3
Rasio Efektivitas	10	1,004	1,405	1,170	0,114743897
Rasio Efisiensi	10	0,884	1,046	0,956	0,051568443
Rasio Kemandirian	10	0,243	0,714	0,409	0,162403248
Rasio Keserasian	10	0,036	0,198	0,115	0,051388338
Rasio Pertumbuhan	10	0,041	0,217	0,128	0,057535478

Dari tabel di atas kita dapat melihat statistik deskriptif belanja modal, PAD serta beberapa rasio kinerja keuangan pada Kota Yogyakarta. Pada belanja modal memiliki nilai minimal Rp. 14.556.260.000,- pada tahun 2005 dengan nilai maksimal yaitu Rp. 193.078.200.000,- yang terjadi pada tahun 2014. Rata-rata realisasi belanja modal selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 95.862.791.000,- serta standart deviasi sebesar Rp 52.219.273.780,-. Kemudian PAD memiliki nilai minimal Rp. 89.196.420.000,- yang terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimal yaitu sebesar 470.630.760.000,- yaitu nilai PAD pada tahun 2014. Rata-rata realisasi PAD selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 219.444.516.000 serta standart deviasi sebesar Rp 133.306.692.300,-.

Pada kinerja keuangan daerah ada beberapa indikator rasio keuangan yang dapat kita lihat pada tabel diatas. Indikator rasio efektivitas pada Pemda di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai rata-rata 117% nilai yang sangat tinggi sehingga dapat dikatakan pemda Kota Yogyakarta memiliki kinerja keuangan baik dari segi efektivitasnya. Rasio efektivitas minimum pada angka 100% yaitu terjadi pada tahun 2010 dan nilai maksimal 140,5% pada tahun 2012. Standar deviasi rasio efektivitas Kota Yogyakarta yaitu 11,5%.

Indikator rasio efesiensi dimanaperbandingan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan dimana semakin kecil belanja daerah dan semakin besar nilai pendapatan daerah pada keuangan pada Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan baik dimana berarti semakin kecil rasio efesien dapat

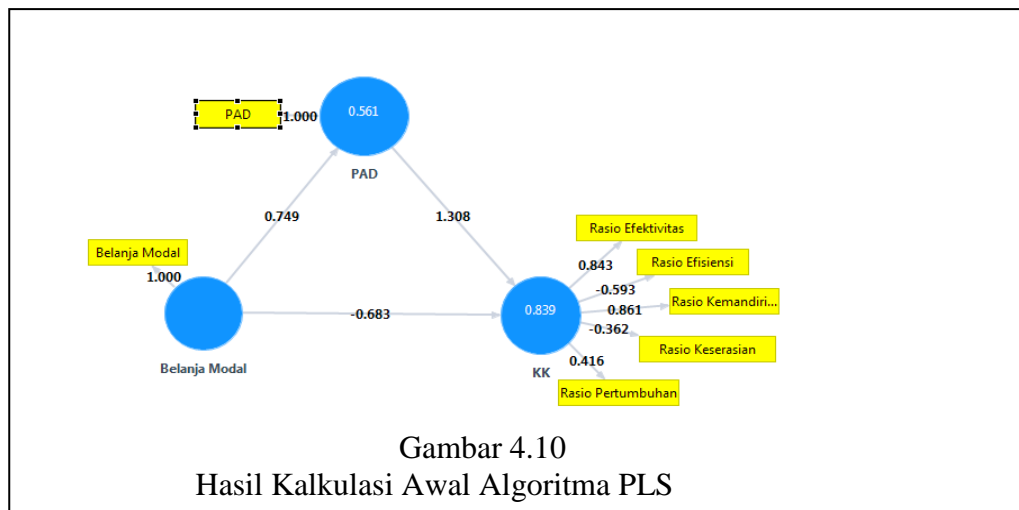
dikatakan semakin baik kinerja keuangan tersebut. pada Pemda di Kabupaten Kota Yogyakarta menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 96% , dimana dapat dikatakan nilai yang tinggi namun tidak baik atau artinya kinerja keuangan Kota Yogyakarta belum efisien selama 10 tahun tersebut. Rasio efisiensi minimum pada angka 88% yaitu terjadi pada tahun 2012 dan nilai maksimal 105% pada tahun 2009. Standar deviasi rasio efisiensi Kota Yogyakarta yaitu 52%.

Indikator rasio kemandirian dimana perbandingan antara realisasi PAD daerah terhadap realisasi dana perimbangan. Jika nilai rasio kemandirian semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut. Rasio kemandirian pada Pemda di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai rata-rata selama 10 tahun yaitu 41% dimana dapat dikatakan nilai cukup lumayan dimana mengindikasikan bahwa pemda Kota Yogyakarta memiliki pendapatan asli daerah yang cukup walau masih bergantung terhadap dana dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian minimum pada angka 24% yaitu terjadi pada tahun 2006 dan nilai maksimal 71% pada tahun 2014. Standar deviasi rasio kemandirian Kota Yogyakarta yaitu 16%.

Indikator Rasio keserasian belanja modal dimana didapatkan dari perbandingan nilai realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja daerah. Pada Kota Yogyakarta nilai rata-rata 10 tahun yaitu 11,5% dengan standar deviasi 5%. Nilai minimum yaitu 4% terjadi pada tahun 2005 dan nilai maksimum yaitu sebesar 20% pada tahun 2006.

Indikator pertumbuhan di mana nilai rata-rata 10 tahun pertumbuhan kinerja keuangan dari segi pendapatan sebesar 13%. Nilai minimum yaitu 4% yang terjadi pada tahun 2009 dan nilai maksimum nya yaitu sebesar 22% pada tahun 2012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari indikator pertumbuhan mengalami turun dan naik yang fluktuatif dan salah satu yang seharusnya perhatian pemerintah dan perlu di telaah lebih lanjut.

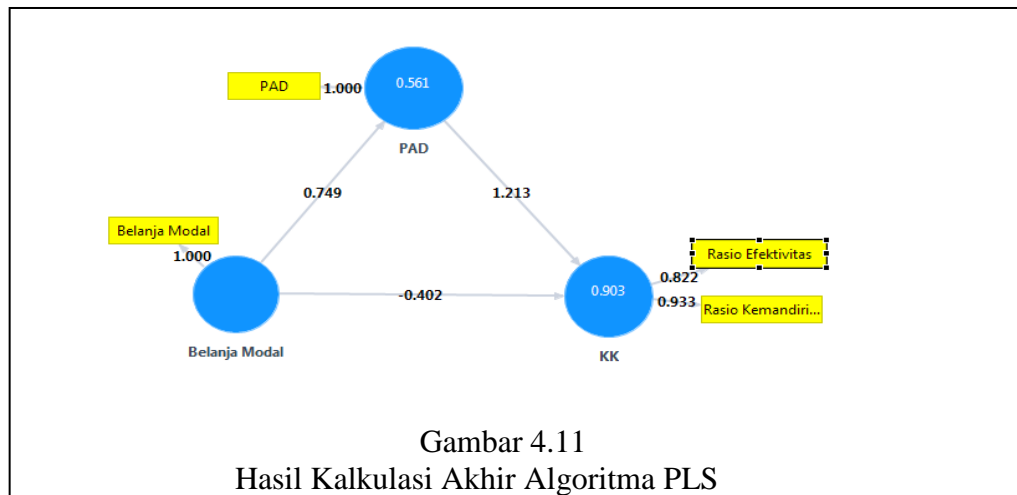
b. Evaluasi Outer Model



Sumber : Hasil olah data PLS

Kinerja Keuangan (KK) merupakan indikator reflektif. Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan ada dibawah angka 0,5 sehingga ketiga indikator ini di drop dari model. Sementara rasio efektivitas memiliki *loading factor* 0,843 dan rasio kemandirian memiliki 0,861 dimana kedua *loading factor* tersebut $> 0,5$ yang artinya kedua rasio tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan indikator pengukur konstruk Kinerja Keuangan (KK). Setelah indikator rasio keserasian dan rasio pertumbuhan di drop dari model, maka

dilakukan *calculate algorithm* kembali, berikut hasil kalkulasi akhir algoritma PLS model penelitian ini :



Sumber : Hasil olah data PLS

Berdasarkan gambar dapat dilihat *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas yaitu 0,822 dan rasio kemandirian 0,933; sehingga dapat dinyatakan konstruk Kinerja Keuangan (KK) sudah memenuhi uji *Convergent Validity* karena *loading* faktornya $>0,5$. Selain uji *Convergent Validity* konstruk dengan indikator reflektif juga dapat diuji *Discriminant Validity* dengan melihat *cross loading*, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.34
Discriminant Validity Cross Loadings

	Belanja Modal	KK	PAD
Belanja Modal	1.000	0.507	0.749
PAD	0.749	0.912	1.000
Rasio Efektivitas	0.196	0.822	0.552
Rasio Kemandirian	0.612	0.933	0.975

Sumber : Hasil olah data PLS

Cross loadings berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki *discriminant validity* yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan

korelasi indikator suatu konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jika korelasi indikator konstruk yang dituju memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki *discriminant validitas* yang tinggi. Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat bagaimana nilai *loading factor* dari indikator yaitu rasio efektivitas, rasio efesiensi dan kemandirian terhadap konstruk yang dituju yaitu kinerja keuangan (KK). Gambar diatas menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator rasio efektivitas mempunyai *loading factor* kepada KK yaitu 0,822 yang lebih tinggi dari pada *loading factor* kepada BM (0,196), dan PAD (0,552). Namun berbeda dengan rasio kemandirian, penilaian *loading factor cross loadings* pada *discriminant validity* dianggap tidak baik karena nilai *loading factor* tertinggi pada PAD yaitu 0,975 dan konstruk yang dituju yaitu KK 0,933.

Tabel 4.35
Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
Belanja Modal	1.000
KK	0.773
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted (AVE)*. Nilai yang disarankan yaitu diatas 0,5. Dari gambar diatas kita dapat mengetahui nilai AVE diatas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian.

Tabel 4.36
Composite Reliability

	Composite Reliability
Belanja Modal	1.000
KK	0.871
PAD	1.000

Sumber : Hasil olah data PLS

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7. Pada gambar hasil analisis PLS semua nilai konstruk >0,7 sehingga konstruk pada model memenuhi kriteria.

c. Evaluasi Inner Model atau Pengujian Hipotesis

Setelah mengevaluasi outer model selanjutnya adalah evaluasi pada inner model sekaligus uji hipotesis model penelitian ini. Evaluasi inner model dan uji hipotesis model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37
R Square

	R Square
KK	0.903
PAD	0.561

Sumber : Olah data PLS

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa konstruk PAD dapat diterangkan oleh konstruk variabel Belanja Modal (BM) sebesar 56,1 % sementara 43,9% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Konstruk variabel kinerja keuangan (KK) dapat diterangkan oleh konstruk PAD dan Belanja Modal sebesar 90,3% sementara 9,7% variabel kinerja keuangan diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.38
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Belanja Modal -> KK	-0.402	-0.348	0.270	1.489
Belanja Modal -> PAD	0.749	0.654	0.291	2.572
PAD -> KK	1.213	1.168	0.217	5.591

Sumber : Hasil olah data bootstrapping PLS

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t statistik yang diperoleh untuk penelitian ini. Batas nilai t untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu 1,89. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan.

Nilai uji t diperoleh analisis PLS untuk belanja modal terhadap Kinerja keuangan (KK) pada Kota Yogyakarta yaitu 1,489 dimana $1,489 < 1,89$ dimana dari hasil tersebut menyatakan bahwa belanja modal tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga **hipotesis 5** ditolak karena tidak signifikan serta berpengaruh negatif.

Hasil pengujian PLS mengenai pengaruh variabel belanja modal terhadap PAD memiliki koefisien dengan arah positif dengan nilai t 2,572. Nilai t 2,572 tersebut lebih besar dari t tabel 1,89 dimana bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD, karena dengan meningkatnya PAD pemerintah dapat memenuhi pembiayaan untuk belanja daerahnya sendiri, dan semakin mandiri dalam keuangan serta tidak bergantung kepada bantuan pemerintah pusat.

Pengujian hipotesis 10 dimana menguji pengaruh tidak langsung dari belanja daerah (BM) terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Tabel 4.39
Hasil Koefisien Jalur dan Standart Error

	P	SE
BM -> PAD	0,749	0,291
PAD -> KK	1,213	0,217

Dari hasil tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Sobel sebagai berikut :

Tabel 4.40
Hasil Perhitungan Rumus Sobel

	$P_1.P_2$	$P_1^2.SE_2^2$	$P_2^2.SE_1^2$	$SE_1^2.SE_2^2$	Sp_1SP_2	t
BM -> PAD -> KK	0,908537	0,026417	0,124597	0,003988	0,393702	2,307675

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD tidak dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t dari hasil hitung lebih besar yaitu sebesar 2,307675 dengan demikian **hipotesis 10 (H10) diterima.**

C. Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan

Ditolaknya hipotesis 1 sampai 5 memberikan hasil bahwa dalam penelitian ini tidak menunjukkan dimana ada pengaruh yang signifikan positif Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada setiap 4 Kabupaten dan 1 Kota di provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil analisis perhitungan menunjukkan bahwa meningkatnya belanja modal akan meningkatkan kinerja pemerintah tidak terjadi menurut penelitian yang saya lakukan. Tentu saja hal ini diluar harapan dan dugaan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang sama juga di

perolehdari penelitian terdahulu, dimana bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

- a. Pada penelitian Nugroho 2015 dimana hipotesis mengenai dugaan adanya pengaruh signifikan positif belanja modal terhadap kinerja keuangan ditolak. Hasil perhitungan menggunakan alat PLS tersebut menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan namun kearah negatif, sehingga dinyatakan hipotesis ditolak. Pada penelitian tersebut Nugroho 2015 menyatakan bahwa Hal ini dikarenakan kinerja pegawai yang tidak maksimal dan lebih cenderung untuk melakukan tindakan korupsi dengan menyalah gunakan anggaran belanja modal tersebut untuk kepentingan pribadi. Seperti yang yang dilakukan oleh Istri Wali Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih yang juga sebagai anggota DPRD kota Salatiga ini dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).
- b. Darwis (2015) hasil penelitian dia didapatkan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Darwis (2015) juga menyatakan belanja modal yang terjadi kurang merata atau rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat kemandirian antar daerah.

Tabel 4.41
 Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya
 Di daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	50,13	15,71	15,34	17,41	19,71	25,26
2. Ketertiban dan Keamanan	0,63	0,87	1,19	1,05	1,99	0,03
3. Ekonomi	8,98	8,24	5,55	8,69	12,67	5,84
4. Lingkungan Hidup	1,57	0,29	1,67	1,47	2,13	3,47
6. Perumahan dan Fasilitas Umum	13,47	13,39	11,27	5,75	19,73	17,41
6. Kesehatan	4,81	12,72	16,21	9,91	27,29	13,51
7. Pariwisata dan Budaya	11,53	0,48	0,73	0,83	0,96	1,17
8. Pendidikan	7,15	47,72	46,69	53,67	13,91	31,62
9. Perlindungan Sosial	1,74	0,58	1,35	1,21	1,62	1,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ber : <http://yogyakarta.bps.go.id>

Menurut Statistik Keuangan Daerah tahun 2013-2014 bahwa realisasi belanja Kab/Kota di D.I Yogyakarta paling banyak membelajakan anggarannya di sektor pendidikan. Dapat dilihat pada gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten dan Kota di provinsi Yogyakarta memberikan perhatian kepada pelayanan umum atau fasilitas umum dengan nilai persentasi yang lebih sedikit. Sehingga dapat dikatakan perhatian pada setiap pemda Kabupaten/kota di D.I Yogyakarta lebih besar pada pendidikan jika dibandingkan terhadap belanja modal atau belanja pembangunan.

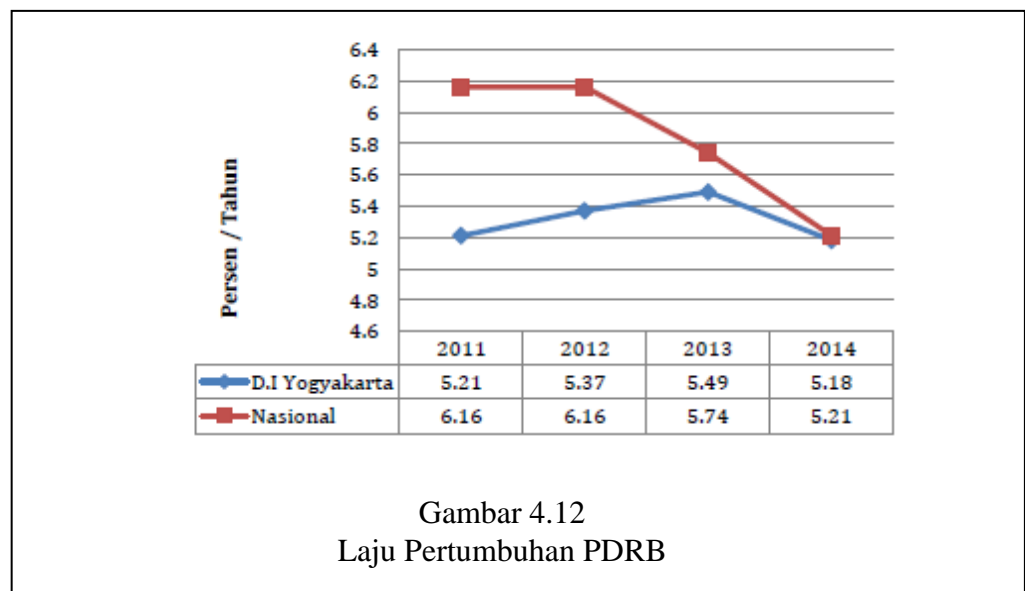
Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan daerah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar golongan pendapatan. Penyebab

kesenjangan di DIY tergolong kesenjangan ekonomi dan sosial DIY adalah adanya perbedaan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Pada pembahasan Bab 1 pada gambar 1.1 mengenai Grafik Realisasi Belanja Modal Daerah Seluruh Indonesia tahun 2013 didapatkan bahwa DIY adalah termasuk Provinsi yang rendah terhadap daerah lain.

Pemerataan pembangunan daerah dengan peran pemerintah adalah penting untuk daerah tertentu yang tertinggal, mengingat dimana tingkat investasi swasta pada daerah tersebut yang masih rendah. Pada daerah daerah tertinggal tersebut tentu harapannya bantuan pemerintah untuk mempercantik dan membangun infrastruktur wilayah agar usaha swasta mulai berkembang. Pada tahun 2014 pada analisis kinerja keuangan di dapatkan perbandingan belanja modal terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota D.I Yogyakarta 10 -15 persen dimana angka tersebut angka yang cukup kecil.

Penyerapan belanja daerah dipengaruhi oleh kinerja SKPD sehingga peningkatan kinerja SKPD diharapkan dapat optimal. Apabila anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Belanja modal di DIY tergolong rendah seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, jamkesmas, PNPM, dan program sosial lainnya. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah DIY. Masalah yang harus dikedepankan dalam analisis pembangunan

daerah DIY salah satunya adalah rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah (analisis pembangunan wilayah Provinsi D.I Yogyakarta.2015).



Gambar 4.12
Laju Pertumbuhan PDRB

Sumber : BPS. 2014

Perekonomian Provinsi DIY selama tahun 2010-2014 menunjukkan kinerja kurang baik, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen dimana angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yaitu sebesar 5,9 persen. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi, dimana dengan pertumbuhannya ekonomi dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja terbesar pemda Kabupaten dan Kota D.I Yogyakarta paling besar pada pos pendidikan atau upaya peningkatan mutu SDM. Dimana belanja modal D.I Yogyakarta tergolong masih kecil. Realisasi belanja modal memerlukan efektivitas dan efisien yang baik agar anggaran belanja modal dapat memberikan pembangunan kuantitas dan kualitas yang baik dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada kenyataannya tidak ada nampaknya penambahan laju pertumbuhan ekonomi dimana digambarkan pada gambar 4. Laju perekonomian tahun 2012-2014 tersebut menunjukkan bahwa kinerja kurang baik. Sehingga tidak didapatkan dalam penelitian ini khususnya belanja modal Kabupaten dan Kota D. I Yogyakarta memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan dengan melalui PAD sebagai variabel Intervening

Pada analisis hipotesis H6 sampai H7 mengenai bagaimana pengaruh belanja modal terhadap Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening menemukan hasil yang berbeda di beberapa daerah. Pada H7, H8 dan H9 yaitu pada daerah Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul dan Kab. Sleman menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening atau hipotesis ditolak. Sedangkan pada H6 dan H10 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan dinyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima.

Pada penelitian sebelumnya didapatkan yaitu Puspitasari (2015) bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Dimana belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika. Semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Nugroho (2012) dimana hasil analisis penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan meingkatnya belanja modal berarti pemerintah telah meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga masyarakat lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya dan dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah yang nantinya, akan meningkatkan PAD, peningkatan PAD ini juga yang kemudian akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa perlu adanya pemerataan pembangunan setiap daerah. Pada hasil analisis pada penelitian ini dapat menunjukkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo memberikan hasil adanya pengaruh signifikan positif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening. Sehingga pada kedua daerah tersebut sudah dapat diartikan secara empiris penelitian adanya pengaruh dimana meningkatnya belanja modal dapat

memberikan pengaruh juga meningkatnya kinerja pemerintah melalui pendapatan asli daerah.

Namun pada Kabupaten Bantul, Gunung Kidul serta Sleman tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan serta efisien dan efektif yang merata pada semua daerah. Kemungkinan besar ketiga daerah tersebut belum menunjukkan pembangunan daerah seperti yang diharapkan serta output yang baik tidak menunjukkan bahwa belanja pembangunan di daerah tersebut memberikan pengaruh kinerja pemerintah daerah serta PAD ketiga daerah tersebut.

Selain itu, dengan anggaran belanja pembangunan daerah maka harapan dampak terhadap laju perekonomian daerah dimana yang akan berakhir pada peningkatan PAD daerah tersebut. Namun peningkatan PAD terhadap alokasi belanja modal tidak langsung pada periode tersebut atau sebagai contoh peningkatan belanja modal 2011 tidak dapat langsung mempengaruhi PAD 2011. Bahwa suatu kejadian tidak selalu di pengaruhi faktor-faktor yang sama tetapi juga pada waktu sebelumnya dimana pada kondisi tersebut adalah lag. Sehingga ada kemungkinan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening suatu daerah adalah tidak digunakannya lag pada regresi penelitian ini.